



Eksekutif Legislatif Kalbar Sepakati Usulan DOB Kabupaten Ketapang

Keterangan

Pontianak:KM – DPRD Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat paripurna pada Rabu (17/9/2025) dan menyetujui usulan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Ketapang.

Keputusan itu sekaligus menandai penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur Kalbar.

Tiga DOB yang diusulkan adalah Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Matan Hulu, dan Kabupaten Hulu Aik.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP, . M. Si menyampaikan apresiasi kepada Pemprov dan DPRD Kalbar yang ia nilai serius serta berkomitmen mendukung pemekaran wilayah.

“Salam hormat dan terima kasih saya dan masyarakat Ketapang kepada Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan DPRD Provinsi, Ketua Komisi I, dan seluruh anggota DPRD atas persetujuan terhadap usulan tiga DOB dari Pemkab Ketapang,” ujar bupati.

Bupati menegaskan, usai paripurna ini, Pemkab Ketapang akan terus berikhtiar membantu Pemprov dalam pengajuan ke pemerintah pusat.

“Tinggal kita berjuang bersama ke Mendagri dan DPR RI. Kami akan berupaya semaksimal mungkin mendukung Gubernur Kalbar dalam mengajukan usulan ini, serta meminta dukungan semua pihak, termasuk anggota DPR RI dari Dapil Kalbar dan tokoh nasional asal Kalbar seperti Pak Oso,” tegasnya.





Menurutnya, luas wilayah Kabupaten Ketapang menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan. Karena itu, pemekaran harus dilihat sebagai solusi strategis, bukan sekadar wacana politik menjelang Pilkada.

“Ketapang hampir seluas Provinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang tersebar, pemekaran menjadi harapan masyarakat untuk mendekatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan,” jelasnya.

Bupati juga berharap, apabila moratorium pemekaran wilayah dibuka atau ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat, tiga DOB di Ketapang yang sudah disetujui Pemprov dan DPRD Kalbar dapat

segera direalisasikan.

Meski begitu, ia menegaskan Pemkab Ketapang tetap memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan APBD untuk mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan.

“Pemekaran tidak boleh hanya jadi wacana, tapi harus diwujudkan dengan komitmen nyata demi kemajuan Ketapang,” tutupnya.**

Kategori

1. Parlement

Tanggal Dibuat

2025/09/17

Penulis

msaad

default watermark